

INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP KEBEBASAN PERS DAN MUNCULNYA EUFIMISME

Moch. Syahri

Berita merupakan rekontruksi tertulis dari sebuah fakta. Sebagaimana sebuah rekontruksi, fakta harus disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Untuk itu, bahasa mempunyai peranan penting. Penggunaan bahasa yang baik oleh wartawan menentukan rekontruksi sebuah fakta. Tetapi pada kenyataan tidak demikian, intervensi pemerintah ikut menentukan (sensor) fakta yang akan disampaikan. Agar fakta yang akan disampaikan lolos sensor, maka wartawan menggunakan bahasa penghalusan (eufimisme) dalam menulis berita. Konsekwensinya, makna kejadian yang dimuat menjadi kabur.

Berita tentang suatu peristiwa pada dasarnya adalah suatu rekonstruksi tertulis. Wartawan melaporkan kembali apa yang dilihat, dirasakan, dan diamati kepada pembaca. Idealnya, seorang wartawan harus dapat menceritakan ulang sebuah peristiwa secermat mungkin, sehingga pembaca seolah-olah melihat langsung di tempat kejadian.

Untuk melakukan hal tersebut, peran bahasa sangat penting, karena dengan penggunaan bahasa yang baik, fakta yang ditulis akan dapat ditangkap oleh pembaca sebagaimana fakta yang sesungguhnya. Hanya lewat bahasa yang cermatlah rekonstruksi tertulis itu dapat mengantarkan pembaca untuk membayangkan apa sesungguhnya terjadi (Siregar, 1998:90). Dalam hal ini kemampuan menggunakan ragam bahasa jurnalistik sangat diperlukan. Ragam bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang memiliki ciri singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, menarik, dan baku (Anwar, 1991:1).

* Moch. Syahri adalah dosen Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

Singkat dalam arti kalimat yang digunakan tidak panjang. *Padat* dengan sedikit kata-kata dapat menggambarkan fakta yang ada. *Sederhana* kalimat yang digunakan tidak berbelit *Jelas*, kata-kata yang digunakan dalam kalimat tidak sampai menimbulkan salah tafsir. *Lugas* berarti bahasa yang digunakan polos, apa adanya, tidak mengada-ada. Terakhir, *baku* berarti harus menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia baku secara cermat.

Secara teoritis dengan mengikuti kaidah yang disebutkan diatas wartawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi dalam kenyataannya tidak sesederhana itu. Faktor-faktor eksternal kenyataannya ikut menentukan, diantaranya adalah sistem pers dan sistem politik di suatu negara. Karena pada dasarnya, sistem pers merupakan subsistem dari sistem politik (Mursito, 2000:18). Begitu juga di Indonesia, sistem persnya-pun terkait dengan sistem politiknya (baca: pemerintah). Interaksi keduanya menentukan bagaimana seharusnya pers berperan dalam menjalankan tugasnya. Makalah ini akan mengulas intervensi pemerintah terhadap kebebasan pers dan munculnya eufimisme dalam berita.

SISTEM PERS INDONESIA

Secara teoritis sistem pers yang dianut di Indonesia adalah sistem pers Tanggung Jawab Sosial. Pemikiran dasar teori ini sebagai berikut (Peterson, 1986:83):

Bahwa kebebasan, mengandung di dalamnya suatu tanggungjawab yang sepadan; dan pers, yang telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat, harus bertanggungjawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Asal saja pers tahu tanggung-jawabnya dan menjadikan itu landasan operasional mereka.

Di Indonesia, landasan konstitusi yang dipakai adalah pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dengan mengacu pada pasal tersebut, secara nyata kebebasan pers mendapat jaminan yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya, yaitu (1) melayani sistem politik dengan menyediakan ruang diskusi bagi masyarakat untuk berdebat terutama dalam masalah kebijakan publik, (2) menjadi anjing penjaga dan hak-hak perorangan warga negara (kontrol sosial), dan (3) membiaya finansial secara mandiri (Peterson, 1986:84).

Kontrol sosial yang dimaksud bahwa pers memposisikan sebagai kakuatan keempat (*four estate*) untuk mengontrol lembaga-lembaga politik lain yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam menjalankan fungsinya. Jika ada penyelewengan yang dilakukan oleh ke tiga lembaga tersebut maka pers akan mengontrol lewat pemberitaan dan pada akhirnya publik akan tahu dan ikut berpartisipasi dalam proses keputusan suatu kebijakan lewat diskusi di media. Selanjutnya secara operasional pers harus dapat menghidupi diri sendiri tanpa meminta bantuan kepada pemerintah. Ini diperlukan untuk menghindari tekanan-tekanan dari pihak pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut pers Indonesia mempunyai Undang-Undang (UU) yang dijadikan landasan operasionalnya yaitu UU tentang pers. Hingga sekarang, sudah tiga kali UU tentang pers mengalami revisi, yaitu UU No. 11 Tahun 1966. Kemudian direvisi dengan UU No. 21. Tahun 1982, dan terakhir direvisi de-

ngan munculnya UU. No. 40 Tahun 1999. Disamping itu ada beberapa keputusan menteri dan pertauran pemerintah.

Dalam UU pers (UU. No. 11/1966 maupun UU. No. 21/1982) disebutkan secara jelas fungsi pers di Indonesia. Diantaranya, disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 point c, bahwa tugas pers memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggungjawab. Pasal-pasal lainnya juga mengatur aturan pers dalam berinteraksi dengan pihak lain, misalnya tentang penggunaan hak jawab bagi pihak yang dirugikan, tidak dikenal istilah *bredel* dan mekanisme yang dilakukan jika pers melakukan pelanggaran.

Jika melihat hal yang demikian, pers Indonesia mempunyai landasan operasional yang memadai. Tetapi jika melihat proses pergantian UU Pers, ada hal menarik. Proses perubahan UU Pers tidak terlepas proses pergantian kepemimpinan nasional yang secara tidak langsung ikut mengubah arah kebijakan politik di Indonesia. Begitu juga dengan hubungan pers dan pemerintah. UU No. 11 Tahun 1966 dibuat pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. UU No. 21 Tahun 1982 dibuat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (jaman Orde Baru), dan UU No. 40 Tahun 1999 dibuat pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Dari ketiga proses pergantian UU dan kepemimpinan nasional, masa pemerintahan Presiden Soeharto merupakan masa yang menarik bagi perkembangan pers, terutama hubungan pers dan pemerintah.

INTERVENSI PEMERINTAH ORDE BARU DAN EUFIMISME

Dalam masa-masa awal pemerintahan Orde Baru, watak kebudayaan politik berkembang ke kepemimpinan baru yang perhatiannya terus menerus diarahkan untuk

menciptakan mekanisme yang dapat meminimalkan konflik-konflik. Pada saat yang sama memaksimalkan produktifitas ekonomi (Latif dan Ibrahim, 1996:27). Stabilitas politik menjadi kata kunci utama bagi pemerintah Orde Baru yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antarkomponen dibuat se-harmonis mungkin untuk menghindari konflik, karena sebagai rezim yang baru masih membutuhkan dukungan semua golongan, begitu juga hubungannya dengan pers. Pemerintah Orde Baru yang masih melakukan konsolidasi, jelas membutuhkan dukungan pers (Hanazaki, 1998:19). Proses pengurusan Surat Ijin Terbit yang sebelumnya rumit dlonggarkan. Sehingga dengan mudah pemerintah mengeluarkan Surat Ijin Terbit (SIT) (dalam UU No. 11 Tahun 1966 untuk mendirikan surat kabar dibutuhkan SIT yang dalam UU No. 21 Tahun 1982 diganti dengan istilah SIUPP) yang mencapai 1559 (Soebagijo dalam Hanazki, 1998:19)

Praktis antara tahun 1966 sampai dengan awal tahun 1970-an hampir tidak ada masalah antara pers dengan pemerintah. Pers boleh meliput apapun sejauh pers tidak menentang kekuasaan yang anti komunis (Oey dalam Hanazaki, 1998:20) Tetapi, sejak awal 1970-an masalah mulai muncul. Lambat laun kebebasan mulai dikekang, terutama menjelang dilaksanakannya pemilu 1971. Secara perlahan musuh politik presiden Soeharto mulai muncul, orang-orang yang tidak puas terhadap pemerintahan baru berani berbicara lantang. Peristiwa-peristiwa semacam ini tidak luput dari liputan pers. Liputan yang dilakukan pers ikut menyulut komponen lain untuk menentang pemerintah. Puncaknya meletuslah peristiwa Malari 1974 yang menentang penggunaan produk buatan Jepang. Sejak peristiwa tersebut, pemerintah mu-

lai melakukan kontrol terhadap pers. Karena pers mulai dianggap membahayakan stabilitas negara.

Memang pemerintah Orde Baru telah menciptakan mekanisme kontrol yang efektif terhadap pers. Kontrol itu bisa berupa slogan-slogan, seperti "pers yang bebas dan bertanggung jawab" atau "interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat (Luwarso, 1998, 27). Untuk memenuhi harapan ini, yang diperlukan bukan saja penggelaran aparat represif dari negara untuk mengendalikan oposisi dan pembangkangan, tetapi tak kalah hebatnya upaya-upaya mengendalikan dan memanipulasi sistem reproduksi ideasional demi meratakan jalan bagi pengoperasian hegemoni makna (Ibrahim, 1996:27-28). Perekrayaan isu menjadi efektif karena kontrol kekuasaan terhadap media massa, sehingga kekuasaan bisa menentukan apa yang boleh dimuat dan tidak boleh dimuat dalam hampir semua media massa resmi melalui "budaya telepon", "pembinaan", ancaman pembredelan dan kontrol melalui saham yang ditanamkan di media massa yang bersangkutan (Sudjatmiko, 2000:251).

Budaya telepon merupakan usaha yang dilakukan oleh aparat untuk mengontrol isi pers. Mereka menentukan isu mana yang boleh dimuat. Umumnya dilakukan pada saat surat kabar akan naik cetak dengan cara menelepon pemimpin redaksi surat kabar yang bersangkutan. Kemudian ada istilah pembinaan terhadap pers yang diambil perannya oleh Departemen Penerangan melalui Dewan Pers dengan menteri penerangan sebagai ketuanya. Yang tidak kalah menakutkan adalah ancaman pembredelan. Pembredelan merupakan hal yang sangat ditakuti oleh pers. Padahal secara nyata dalam UU Pers disebutkan bahwa "Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan". Pembredelan terhadap suatu penerbitan

akan mengakibatkan kerugian yang besar. Karena pers pada zaman Orde Baru sudah menjadi institusi bisnis yang melibatkan modal yang tidak kecil. Jurnalisme abad ke-20 adalah produk kepentingan bisnis media dan pemasang iklan yang mengambil keuntungan besar (Chesney, 1998: 21).

Intervensi melalui penguasaan saham juga merupakan salah satu cara yang efektif bagi pemerintah. Seperti diketahui, banyak sekali kroni-kroni elite politik menguasai jaringan penerbitan di Indonesia yang cenderung membentuk konglomerasi media dari hulu sampai hilir. Sebagai contoh mantan menteri penerangan Harmoko menguasai mayoritas saham di Pos Kota Group yang membawahi 31 penerbitan, Surya Paloh dan Siti Hardijanti Rukmana dengan Surya Persindo Groupnya membawahi 6 penerbitan, Jawa Pos Group yang dimiliki oleh Eric Samola membawahi hampir 23 anak perusahaan penerbitan (Hanazaki, 1998:104--107). Data tersebut belum termasuk stasiun televisi swasta yang hampir semuanya dimiliki oleh kroni Cendana. Seringkali para pemilik saham tersebut ikut campur dalam masalah isi redaksional penerbitan. Contoh kasus majalah Gatra yang dimiliki oleh Bob Hasan, Bob Hasan sering mengintervensi isi pemberitaan terutama jika menyangkut kepentingan Cendana dan kepentingan bisnisnya. Pada kasus pembredelan majalah Tempo ada *deal-deal* dibelakang layar yang membolehkan Tempo terbit kembali dengan syarat Gunawan Mohammad keluar dari Tempo.

Ciri yang menonjol dalam pelaksanaan kebebasan di Indonesia, kesalahan-kesalahan yang ditimpakan kepada pers oleh pemerintah tidak dibuktikan melalui pengadilan (Armada, 1993:53). Setiap kesalahan yang ditimpakan kepada pers tidak pernah dibuktikan secara hukum. Penafsiran secara sepihak oleh pemerintah sering

dilakukan. Salah satu yang menonjol dalam periode ini adalah seringkali ukuran-ukuran yang dipakai untuk melaksanakan kebebasan pers berbeda (Armada, 1993: 53). Ukuran tentang apa yang boleh dimuat dan tidak boleh dimuat tidak pernah konsisten setiap waktu. Contoh yang menimpa majalah mingguan *Fokus, Fokus dibredel* dikarenakan memuat artikel yang berisi daftar 200 orang kaya di Indonesia, tetapi untuk kasus berita yang sama lima tahun kemudian tidak menjadi persoalan.

Walaupun demikian, tidak berarti pers berdiam diri dan tidak melakukan kontrol terhadap pemerintah. Berbagai upaya dilakukan untuk menyasati keadaan tersebut. Seorang wartawan senior, Jakob Oetama pernah mengemukakan, agar tetap selamat, pers Indonesia harus berlaku seperti kepiting bebelok jika terhalang batu (Luwarso, 1998:26). Salah satu yang digunakan adalah penggunaan bahasa eufimisme dalam melaporkan suatu peristiwa yang sensitif.. Eufimisme merupakan gaya bahasa yang menuntut pembaca untuk bisa melihat hal yang tersirat. Akibatnya muncullah dalam khasanah surat kabar kata-kata “diamankan” untuk mengganti kata ditangkap, “diminta keterangan” untuk menggantikan kata hukuman, “penyesuaian harga” untuk menggantikan istilah kenaikan harga, “perbedaan pendapat” untuk menggambarkan adanya perpecahan dalam organisasi, “kekurangan gizi” untuk menggantikan kata kelaparan. Kata-kata yang demikian merupakan produksi media untuk membungkus sebuah fakta agar kelihatan lebih halus. Bagi sebagian kalangan penggunaan bahasa eufimistik mendapat dukungan, karena dianggap lebih sopan atau untuk sopan santun. Tetapi, bagi pers sebetulnya tidak bisa diterima, hal tersebut sama saja dengan menutupi kebenaran yang sebenarnya. Fakta yang ditulis bukanlah fakta yang sesungguhnya. Seringkali kata-kata yang digunakan tidak merujuk ke fak-

ta yang ada . Gaya penulisan eufimistik memaksa pembaca yang tidak kritis menelan mentah-mentah kebenaran, atau buat mereka yang kritis harus mengais-ngais fakta dan kebenaran dari balik penyamaran (Luwarso, 1998:28).

Kenyataan tersebut seolah mendapat dukungan dari kebiasaan insan pers yang “malas”. Artinya, mereka menjadi orang yang malas memburu fakta di lapangan. Dalam mencari berita mereka hanya mengandalkan keterangan dari pejabat yang berwenang. Wartawan hanya mengutip dari apa yang diomongkan oleh pejabat. Dalam kaitan itu selama 25 tahun perkembangannya, birokrasi Indonesia telah tampil sebagai sumber informasi yang paling utama. Survei terakhir yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) mengungkapkan bahwa 46% dari informasi yang dipublikasikan dalam surat kabar Indonesia berasal dari sumber pemerintah (Dhakidae , 1996:246). Kecenderungan jurnalisme Indonesia pada era Orde Baru adalah mengembangkan jurnalistik omongan (*talking news*) (Luwarso, 1998:28).

Dengan posisi yang demikian, maka elite-elite politik mempunyai kesempatan memproduksi kata-kata yang sesuai dengan kepentingannya termasuk dengan menggunakan bahasa eufimisme. Penghalusan atau eufimisme ini tampaknya untuk menyalakan konsep dan pengertian yang bisa membahayakan Orde baru sendiri dan untuk memberikan citra baik kekuasaan Orde Baru kepada masyarakat (Suhriyah, 2000:41). Dalam pertemuan dengan konglomerat di Tapos, mantan Presiden Soeharto menggunakan istilah “menghimbau” kepada para konglomerat agar menyisihkan 2% keuntungan untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Padahal yang dimaksud mewajibkan. Kemudian dalam kedudukannya sebagai ketua dewan pembina Golkar

Soeharto menggunakan kata “perbedaan pendapat” untuk menutupi bahwa ada perpecahan dalam tubuh Golkar.

Barangkali akan lain persoalannya jika eufimisme digunakan sebagai bagian dari budaya sopan santun, dengan syarat hal itu tidak merubah arti yang sesungguhnya. Kalau mengambil istilah Suparno (2000), eufimisme yang diperbolehkan adalah eufimisme yang bernilai positif, seperti ungkapan **kamar kecil, berhalangan, buang air besar** dan lain sebagainya. Tetapi pada kasus pers, eufimisme digunakan untuk menutupi fakta yang sesungguhnya. Tampubolon (dalam Suparno, 2000:13) menggunakan istilah fenomena negatif dalam eufimisme untuk membuat suatu informasi menjadi tidak jelas maknanya. Yang pada ujungnya menimbulkan kebudayaan ketidaksesuaian antara makna dan kata yang pada gilirannya menimbulkan pembusukan moralitas individu, masyarakat dan budaya.

SIMPULAN

Jaman pemerintahan Orde Baru, pemerintah sering melakukan intervensi terhadap kebebasan pers. Intervensi dilakukan dengan melalui budaya telepon, slogan hubungan positif antara pers, pemerintah dan masyarakat, dan dengan melalui penguasaan saham penerbitan. Ancaman paling kuat dilakukan dengan cara *pembredelan* terhadap media yang bersangkutan. Walaupun sering kali *pembredelan* dilakukan tanpa melalui proses peradilan yang fair.

Untuk menghindari tekanan-tekanan pemerintah dan agar tetap bisa hidup, pers menggunakan bahasa eufimisme (penghalusan) dalam pemberitaannya. Konsekwensi penggunaan bahasa eufimisme adalah kaburnya fakta yang disampaikan

yang pada akhirnya membohongi pembaca. Pembaca tidak dapat menangkap dengan pasti apa yang disampaikan oleh media. Dengan kemampuan yang sangat beragam, pembaca dipaksa menginterpretasikan isi media sesuai dengan kemampuannya.

Daftar Rujukan

- Armada, Wina. 1993. *Menggugat Kebebasan Pers*. Jakarta: Sinar Harapan
- Chesney, Robert. 1998. *Konglomerasi Media Massa dan Ancaman terhadap Demokrasi*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia
- Dhakidae, Daniel. 1996. Bahasa, Jurnalisme, dan Politik Orde Baru. Dalam Yudi Latif (Eds). *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (hlm 246-253). Bandung: MIZAN
- Hanazaki, Yasuo. 1998. *Pers Terjebak*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi
- Hestre, Albert. 1997. Pelaporan Selidikan: Pokok Persoalan dan Metode. Dalam Albert L. Hester (Eds). *Pedoman untuk Wartawan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Latif, Yudi dan Idi Subandi Ibrahim. 1996 . *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru (prolog)*. Bandung: MIZAN
- Luwarso, Lukas. 1998. Wajah Media Massa Kita. Dalam Ery Sutrisno (Ed). *Reformasi Media Massa* (hlm 25-35). Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia
- Mursito BM. 2000. Industri Pers: Tumbuh dalam Tekanan dan Kebebasan Politik. *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi*. Oktober 2000 (V): 17-35
- Suparno. 2000. *Budaya Komunikasi yang Terungkap dalam Wacana Bahasa Indonesia*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Schram, Wilbur dan Peterson. 1986. *Empat Teori Pers*. Jakarta: PT. Intermedia
- Siregar, Ashadi (Eds). 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius
- Suhriyah, Halimatus. 2000. *Eufimisme dan Sarkasme dalam Wacana Berita Politik di Media Cetak*. Malang. Skripsi tidak diterbitkan
- Strenzt, Herbert. 1993. *Reporter dan Sumber Berita: Persekongkolan dalam Mengemas dan Menyesatkan Berita*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sudjatmiko, Budiman. 2000. Represi Melalui Media Massa Pada Masa Soeharto. Dalam Dedy N. Hidayat.(Eds). *Pers dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni* (hlm 250-259). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama